

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Republika

Penunjukkan Heru Tuai Kekhawatiran

Nama Heru sempat kalah populer untuk kelayakan menjabat pj gubernur DKI.

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Informasi penunjukan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai penjabat (pj) gubernur DKI memunculkan kekhawatiran karena namanya sempat dikaitkan dengan kasus dugaan suap reklamasi pantai Jakarta dan korupsi pengadaan tanah di DKI. Namun, kasus lama tersebut dinilai Fraksi PDIP DPRD DKI tidak akan mengganggu kinerja Heru saat menggantikan Anies Baswedan se usai purnatugas pada 16 Oktober mendatang.

"Kalau memang ada bukti kuat ya proses hukum yang menentukan itu. Jadi prinsipnya, kalau itu isu benar, silakan dibuktikan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada *Republika*, Ahad (9/10).

Heru sebelumnya sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta saat menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Selain itu, Heru juga dikaitkan dengan kasus pembelian tanah di Cengkareng dan RS Sumber Waras pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Gembong mengungkapkan kasus-kasus lama tersebut tidak akan memengaruhi kinerja Heru sebagai pj gubernur DKI 2022-2024. Heru, menurut dia, memiliki prestasi saat menjadi pejabat DKI Jakarta.

"Kalau kita berbicara karier Pak Heru, ya relatif sangat moncer di DKI Jakarta. Moncernya gimana? Ya pimpinan ASN yang bisa menilai, sementara kami dalam unsur masyarakat mencermati apa saja yang sudah dikerjakan Pak Heru," katanya.

Selain itu, Gembong menampik tuduhan terpilihnya Heru sebagai pj gubernur DKI karena kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, pemilihan Heru sebagai pj gubernur untuk dua tahun masa jabatan dilakukan karena dasar profesionalitas dan kemampuan.

Kalah populer

Sementara itu, dalam sebuah jajak pendapat, nama Heru justru paling kalah populer untuk kelayakan menjabat sebagai pj gubernur DKI dibandingkan dua nama lain usulan DPRD Jakarta, yaitu Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali dan Dirjen Politik dan Pemerintahan

Umum Kemendagri Bahtiar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, Heru hanya mendapatkan 31 persen suara untuk penilaian kelayakan dalam penajakan persepsi publik atas pj gubernur DKI.

"Dari *briefing* responden, Bahtiar menjadi nama yang dinilai paling layak ditunjuk sebagai pj gubernur DKI," kata Dedi.

Menurut Dedi, dari 400 responden langsung dan seribu responden digital, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar memperoleh suara 37 persen. Sedangkan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, mendapatkan hasil sebesar 24 persen untuk kelayakan.

Dedi menilai, penunjukan Heru kental kemungkinan politis karena dekat dengan Presiden Jokowi. Dedi pun menilai, publik merasa khawatir jika keputusan Presiden Jokowi un-

tuk menunjuk Heri sebatas karena kedekatan.

"Publik bisa menilai, jangan-jangan keputusan ini bukan demi DKI," katanya.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Heru menggantikan Anies Baswedan, kurang tepat. Hal itu karena penjabat daerah semestinya tidak memiliki kasus dugaan korupsi.

"Seorang pejabat apalagi satu daerah yang berstatus ibu kota harus bersih dari segala macam kasus yang merintanginya," kata Abdul saat dihubungi, Ahad (9/10).

Abdul khawatir, kasus lama dan belum selesai hingga sekarang itu, bisa mengganggu kinerja Heru. Karena itu, dia menilai, Jokowi harus menjadi penanggung jawab dan menyelesaikan jika ada keriuhan akibat penunjukan Heru.

Kabar penunjukan Heru sebagai pj gubernur DKI diungkap oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (7/10). Anies mengaku telah menerima informasi dan menyampaikan ucapan selamat kepada Heru.

"Selamat kepada Pak Heru Budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi penjabat di DKI Jakarta," kata Anies ketika meluncurkan tarif integrasi di Stasiun MRT ASEAN di Jakarta, Jumat. ■ antara ed: nur aini



Publik bisa menilai, jangan-jangan keputusan ini bukan demi DKI.